KEWENANGAN KELURAHAN DALAM MENGELUARKAN SURAT IZIN KETERANGAN MUDIK (SIKM) PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD ALDI ELFANDI RAHMAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

KEWENANGAN KELURAHAN DALAM MENGELUARKAN SURAT IZIN KETERANGAN MUDIK (SIKM) PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana

dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD ALDI ELFANDI RAHMAN

180102030363

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN

2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Aldi Elfandi Rahman
NIM	: 180102030363
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmmasin, 11 Mei 2000
Jurusan/Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, **"Kewenangan Kelurahan dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) Perspektif Hukum Tata Negara"** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 07 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan

METERAI TEMPEL
027AKX236062348

Muhammad Aldi Elfandi Rahman

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Kewenangan Kelurahan Dalam Mengeluarkan Surat Izin Mudik (SIKM) Perspektif Hukum Tata Negara
Ditulis oleh	:	Muhammad Aldi Elfandi Rahman
NIM	:	180102030363
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Tahun Akademik	:	2022
Tempat dan tanggal lahir	:	Banjarmmasin, 11 Mei 2000
Alamat	:	Komplek Sejahtera Mandiri Asri No. 43

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin,

Pembimbing I,	Pembimbing II
Dr. H. Jalaluddin, M. Hum	Ergina Faralita, S.H, M.H
NIP. 19661126 199102 1 002	NIP. 19881205 201903 2 010

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
NIP. 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Kewenangan Kelurahan Dalam Mengeluarkan Surat Izin Mudik (SIKM) Perspektif Hukum Tata Negara", ditulis oleh Muhammad Aldi Elfandi Rahman, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1.
2. Ahmad Muhajir, SHI, M.A., Ph.D (Anggota)	2.
3. Ergina Faralita, SH, MH (Anggota)	3.
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Muhammad Aldi Elfandi Rahman. 180102030363. *Kewenangan Kelurahan dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) Perspektif Hukum Tata Negara.* Skripsi. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. dan (II) Ergina Faralita, S.H., M.H. Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: SIKM, Kewenangan Kelurahan, Hukum Tata Negara.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) penanganan *Covid-19* melarang masyarakat mudik Hari Raya pada tahun 2021. Hal ini dituangkan melalui Surat Edaran (SE) No. 13 Tahun 2021. Terdapat pengecualian dalam larangan ini kepada beberapa pihak yang musti melakukan perjalanan mudik karena alasan tertentu. Jika pihak ini memenuhi ketentuan, maka mereka akan mendapatkan Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) yang dikeluarkan oleh kelurahan.

Penelitian ini bertujuan mempelajari ketentuan penerbitan SIKM sebagaimana diatur dalam SE No. 13 Tahun 2021. Kata 'ketentuan' di sini mencakup pemegang kewenangan pembuat SIKM dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkannya. Penelitian ini juga menganalisis ketentuan tersebut dari perspektif Hukum Tata Negara.

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang mengandalkan bahan pustaka, khususnya, bahan hukum yang berkategori primer, sekunder dan tersier. Peneliti lalu menjabarkan dan menganalisis data-data yang didapatkan secara deskriptif-kualitatif.

Peneliti menemukan bahwa Lurah/ Kepala Desa berwenang menerbitkan SIKM bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, sebagaimana dinyatakan dalam SE No. 13 Tahun 2021, bagian G, poin ke-3, huruf c dan d. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIKM dari pihak kelurahan, yaitu pengantar RT dan RW, pernyataan yang bertanda-tangan dan materai, Salinan KTP dan KK, alasan yang jelas dan keterangan negatif *Covid-19*. Ini terdapat dalam SE yang sama pada bagian G, poin ke-6. Alasan yang dapat diterima untuk mendapatkan SIKM dari kelurahan antara lain: Mengunjungi keluarga yang meninggal atau sakit, perempuan yang tengah mengandung atau pendampingnya dan perempuan yang akan melahirkan beserta pendampingnya.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemberian kewenangan kepada Lurah untuk menerbitkan SIKM masih sesuai dengan pengaturan mengenai tugas dan fungsi kelurahan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 73 Tahun 2005 pasal 5 ayat 1, yang menyatakan bahwa kelurahan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan dimaksud termasuk juga penerbitan surat-surat yang masyarakat perlukan, termasuk SIKM yang diatur pada tahun 2021. Dengan demikian tidak ada kerancuan atau pelanggaran ketatanegaraan dalam pemberian wewenang kepada kelurahan untuk pelayanan ini.

MOTTO

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ

Maka, sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan.[1]

[1]Quran kementerian Agama: Q.S. Al-Insyirah ayat, 5-6.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	˻	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبّر	Ditulis	*Mutakabbir*
القدوس	Ditulis	*al-quddūs*

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	*Jāmi’ah*

مكتبة	Ditulis	*Maktabah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	*al-maktabah al-jamīlah*

IV. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	Ditulis	Yantiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	*ā* *kāmilah*
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	*ā* *Ṣallā*
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	*I* *syadīd*
4	dammah + wawu mati	ditulis	*U*

	صدور	ditulis	*Ṣudūr*

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai *Ruwaidun*
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis Ditulis	Au *wa fir'auna zi al-autād*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	*a'antum asyaddu khalqan*

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
الكتاب	Ditulis	*al-kitāb*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di*idgamkan*

الصبح	Ditulis	*aṣ-ṣubhu*
الساهرة	Ditulis	*as-sāhirah*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	*birru al-wālidaini*
إذا الشمس	Ditulis	*Iẓa asy-syamsu*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya serta inayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dihanturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari kata khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Kewenangan Kelurahan Dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) Perspektif Hukum Tata Negara"** ini semua sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (S.H), pada fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga-Nya. Oleh karena itu. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin

2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan penulisan yang sesuai dengan perkembangan jurusan pada saat ini..

4. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum., selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi.

5. Ibu Ergina Faralita, S.H, M.H., selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman literatur untuk penyusunan skripsi.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dan membantu pengurusan keperluan perkuliahan hingga perlengkapan skripsi.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar yang dapat diutarakan mudah–mudahan segala amal baik semua pihak yang telah membantu di balas oleh Allah Swt, dengan balasan berlipat ganda dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin.

Banjarmasin, 29 Juli 2022

Penyusun

Muhammad Aldi Elfandi Rahman

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas suatu nikmat yang diberikan.

Kedua orang tua saya, Asmuni Basrani (Alm) dan Hj. Saudah karena telah membimbing, mendidik serta mendoakan saya smpai sekarang ini.

Kakak-kakak saya, Yanti Asnida, S.E., Muhammad Rudi, S.E., Norhanida, S.E., dan Saidatun Nisa, S.Pd., karena telah bertanggungjawab dalam membimbing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**
PERSETUJUAN ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
PERSEMBAHAN ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Signifikansi Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Penelitian Terdahulu 8
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penulisan 15

BAB II INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
A. Negara Hukum
1. Pengertian Negara Hukum 17
2. Tujuan dan Fungsi Negara 19
3. Unsur-Unsur Negara 20
B. Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi Daerah 22
2. Dinamika Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia 23
C. Kelurahan dan Hukum Tata Negara
1. Pengertian Kelurahan 25
2. Kewenangan Kelurahan 27
3. Tugas dan Fungsi Kelurahan 28
4. Pengertian Hukum Tata Negara 28
5. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara 31

BAB III KEWENANGAN KELURAHAN DALAM HUKUM TATA NEGARA
A. Kewenangan Kelurahan Dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) 33

B. Perspektif Hukum Tata Negara Mengenai Kewenangan Kelurahan Dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik.....38

BAB IV PENUTUP
A. Simpulan.....43
B. Saran 44

DAFTAR PUSTAKA 46
LAMPIRAN-LAMPIRAN 52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 101

DAFTAR LAMPIRAN

NO	NAMA	HALAMAN
1	Peraturan Pemerintah	53-83
2	Surat Edaran	84-90
3	Surat Penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi	91
4	Surat Perubahan Judul	92
5	Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian	93
6	Surat Keterangan Telah Seminar	94
7	Surat Izin Melakukan Riset	95
8	Surat Keterangan Selesai Riset	96
9	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	97
10	Sertifikat BTA	98
11	Sertifikat Keterampilan Komputer	99
12	Surat Keterangan Perolehan SKK	100
13	Daftar Riwayat Hidup	101